



Original Article

Pengembangan Doktrin Perang Berlarut dalam Rangka Sistem Pertahanan Negara di Era Modern

Fajar Catur Prasetyo^{1✉}, R. Nugraha Gumilar², Mitro Prihantoro³,

^{1,2,3}Universitas Pertahanan RI, Indonesia

Korespondensi Author: fajar_caturprasetyo@gmail.com

Abstrak:

Amid the increasingly complex and uncertain dynamics of the global strategic environment, Indonesia, as the world's largest archipelagic state, faces multidimensional challenges in safeguarding its sovereignty and national resilience. Prolonged threats (ranging from conventional military aggression, cyberattacks, to economic-political disruptions) demand a fundamental renewal of the national defense doctrine. Currently, Indonesia relies on two primary doctrines, namely OMP and OMSP, which have not fully accommodated the characteristics of long-term, evolving threats. This study aims to analyze the necessity, development direction, and integration of a protracted war doctrine within Indonesia's national defense system. The method used is qualitative-descriptive through literature review, policy analysis, and comparative studies of cases such as the Vietnam War and the Afghan War, both representing the effectiveness of protracted war strategies. The findings reveal that the absence of a protracted war doctrine in Indonesia's defense framework creates a strategic gap in addressing simultaneous and unpredictable threats. Strengthening multidimensional resilience (including military, social, economic, and diplomatic aspects) integrated under a long-term command system is essential. This study recommends that the government promptly formulate and institutionalize a protracted war doctrine as an integral part of Indonesia's archipelagic-based defense system, while also updating legal and strategic policy frameworks to ensure responsiveness to the broad spectrum of evolving modern threats.

Keywords: Defense Doctrine, Protracted War, National Defense System, Non-Traditional Threats, Modern Era

Pendahuluan

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan tidak pasti, negara dituntut untuk menyesuaikan sistem pertahanannya guna menghadapi ancaman yang terus berkembang. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tantangan

tersebut semakin signifikan mengingat luas wilayah, posisi strategis, serta kerentanan terhadap ancaman multidimensi, baik fisik, siber, maupun ekonomi (Kemhan, 2025).

Dalam sistem pertahanan nasional, Indonesia saat ini mengandalkan dua doktrin utama, yaitu Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Namun, doktrin perang berlarut sebagai pendekatan untuk menghadapi ancaman jangka panjang belum terdefinisi dan terintegrasi secara jelas. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan doktrinal dalam merespons ancaman kontemporer yang bersifat berkelanjutan, simultan, dan multidomain (Kemhan, 2023).

Doktrin perang berlarut menjadi penting karena tidak hanya menekankan ketahanan militer, tetapi juga mencakup ketahanan sosial, ekonomi, politik, dan psikologis nasional. Doktrin ini diperlukan untuk menghadapi konflik yang berdurasi panjang serta ancaman non-tradisional seperti siber, terorisme, dan instabilitas kawasan. Pengembangannya harus selaras dengan konsep pertahanan negara berbasis wilayah kepulauan, baik pada pulau-pulau besar maupun gugusan pulau kecil strategis (Fadli, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu menegaskan bahwa doktrin pertahanan Indonesia masih cenderung berorientasi pada ancaman konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi konflik jangka panjang (Hadi, 2020; Fadli, 2020; Ramadhan, 2021). Padahal, pengalaman historis seperti Perang Vietnam dan Perang Afghanistan menunjukkan bahwa perang berlarut dapat menjadi strategi efektif dalam menghadapi kekuatan militer yang lebih unggul melalui daya tahan nasional, legitimasi politik, dan dukungan masyarakat.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah menegaskan sistem pertahanan semesta. Namun, perkembangan ancaman modern menuntut pembaruan doktrin agar lebih responsif terhadap konflik berkepanjangan dan multidimensi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang bahwa pengembangan doktrin perang berlarut dalam sistem pertahanan negara Indonesia di era modern merupakan kebutuhan strategis. Doktrin ini diharapkan mampu memperkuat daya tahan nasional, mengintegrasikan seluruh elemen kekuatan negara, serta menjaga kedaulatan dan stabilitas Indonesia di tengah dinamika ancaman global yang terus berkembang.

Metode

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif deskriptif-eksploratif untuk menginvestigasi secara mendalam konstruksi epistemologis dan praksis pengembangan doktrin perang berlarut dalam sistem pertahanan negara Indonesia. Pemilihan metode ini didasarkan pada asumsi bahwa fenomena doktrin pertahanan merupakan entitas strategis yang kompleks, kontekstual, dan sarat makna, sehingga tidak dapat dianalisis melalui prosedur kuantitatif yang bersifat reduktif. Mengacu pada pemikiran Moleong (2013) mengenai penelitian kualitatif yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam memahami realitas secara holistik, serta pandangan Creswell (2014) tentang relevansi pendekatan kualitatif untuk mengungkap proses, relasi, dan makna dalam sistem sosial strategis, penelitian ini memfokuskan diri pada interpretasi makna dan dinamika institusional yang terkait dengan formulasi doktrin. Data dikumpulkan dan dianalisis secara induktif untuk memungkinkan pola empiris berkembang secara natural tanpa dibatasi kerangka teoretik yang bersifat deterministik.

Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam dan studi dokumentasi, dilakukan pada institusi strategis pertahanan, yaitu Korsahli Panglima TNI dan Asrenum TNI, yang memiliki peran sentral dalam penyusunan kebijakan dan doktrin pertahanan. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan otoritas, kapasitas epistemik, serta keterlibatan langsung dalam proses perumusan doktrin. Keandalan data diperkuat melalui triangulasi sumber, sedangkan analisis data mengikuti prosedur reduksi, kategorisasi, dan interpretasi tematik, sebagaimana lazim dalam analisis kualitatif yang berorientasi pada pencarian pola-pola konseptual dan implikasi strategis. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai rasionalitas, struktur kebutuhan, serta landasan strategis pengembangan doktrin perang berlarut dalam menghadapi ancaman jangka panjang dalam lingkungan strategis kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan ini berangkat dari pemaknaan terhadap temuan penelitian yang mencerminkan cara para pemangku kepentingan pertahanan memahami kebutuhan, tingkat urgensi, serta arah pengembangan doktrin perang berlarut dalam sistem pertahanan negara. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian terhadap dokumen kebijakan menunjukkan adanya dinamika pemikiran serta konfigurasi kelembagaan yang terus berkembang. Perkembangan ini berlangsung seiring dengan perubahan karakter ancaman dan meningkatnya tuntutan terhadap strategi pertahanan Indonesia di era modern.

Temuan-temuan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teoritis dan konseptual yang telah dipaparkan sebelumnya. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu menelusuri keterkaitan antara kondisi aktual pertahanan, kebutuhan pengembangan doktrin, serta implikasi strategis yang ditimbulkan bagi sistem pertahanan negara. Dengan demikian, pembahasan ini secara bertahap menguraikan pola-pola pemikiran yang berkembang, tantangan substantif yang dihadapi, serta peluang pembaruan doktrin yang muncul dari interaksi antara faktor internal pertahanan dan dinamika lingkungan strategis yang lebih luas.

Kondisi Doktrin Pertahanan Indonesia Saat Ini dalam Menghadapi Ancaman yang Bersifat Berlarut, dan Mampu Mengakomodasi Ancaman yang Berkembang di Era Modern

Pengembangan doktrin pertahanan Indonesia memasuki fase yang menuntut perubahan paradigma ketika karakter ancaman global dan domestik berkembang menjadi multidimensional, berlarut-larut, dan saling berkelindan. Perubahan tersebut tidak hanya muncul dari dinamika geopolitik internasional dan kemajuan teknologi yang pesat, tetapi juga dari semakin beragamnya bentuk ancaman, mulai dari agresi militer konvensional hingga ancaman non-konvensional seperti terorisme, serangan siber, disinformasi, dan tekanan ekonomi yang terstruktur. Dalam konteks demikian, Sistem Pertahanan Semesta yang diperkenalkan oleh Nasution (1953) menjadi dasar filosofis dan strategis bagi Indonesia, namun konsep tersebut kini harus diterjemahkan ulang agar mampu menjawab kebutuhan pertahanan modern. Sishankamrata, yang menekankan pelibatan seluruh komponen bangsa (militer, aparat keamanan, pemerintah, swasta, dan masyarakat) tetap relevan, tetapi tuntutan kompleksitas ancaman menuntut pengembangannya menjadi kerangka operasional yang adaptif, bukan lagi sebatas pedoman normatif.

Keterpaduan antara kekuatan militer dan non-militer merupakan inti dari sistem pertahanan Indonesia. Namun, ketika ancaman bersifat berlarut dan berlangsung dalam waktu panjang, ketergantungan pada kemampuan militer saja menjadi tidak memadai. Daya tahan pertahanan negara ditentukan oleh kemampuan mobilisasi potensi nasional secara simultan dan berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan pandangan Creswell (2014), yang menegaskan bahwa fenomena kompleks harus dipahami melalui pendekatan yang melihat interaksi elemen-elemen sistem secara holistik. Dalam konteks pertahanan, interaksi tersebut mencakup aspek militer, sosial, ekonomi, psikologis, dan politik yang membentuk ketahanan nasional. Ancaman yang berlangsung lama, bergerak secara gradual, dan memanfaatkan celah-celah kerentanan struktural suatu negara mengharuskan Indonesia mengembangkan doktrin pertahanan yang tidak hanya reaktif, tetapi mampu mengantisipasi dan mengatasi tekanan secara terus-menerus.

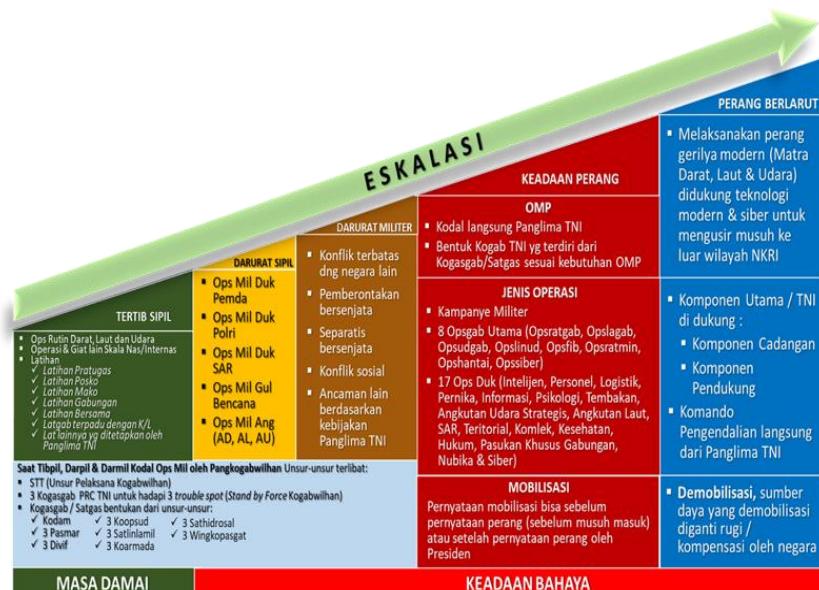
Ketika ancaman tidak datang dalam bentuk perang terbuka, tetapi melalui infiltrasi informasi, sabotase digital, penetrasi ekonomi, atau pengaruh politik, karakter pertahanan negara menjadi semakin ditentukan oleh kemampuan integrasi lintas sektor. Clausewitz (1832) sejak awal telah menekankan bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain, sehingga keberhasilan pertahanan tidak hanya diukur melalui kemenangan militer, tetapi melalui kemampuan negara menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan moral publik. Dalam konteks Indonesia, prinsip perang total ini memiliki relevansi karena ancaman berlarut memungkinkan pihak lawan melemahkan negara secara perlahan melalui tekanan multidomain. Oleh sebab itu, doktrin pertahanan Indonesia harus berkembang menuju bentuk yang tidak sekadar menekankan kekuatan militer, tetapi juga menguatkan kapasitas nasional secara menyeluruh, yakni dari kesiapan logistik, stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, hingga legitimasi politik.

Implementasi doktrin pertahanan berdasarkan prinsip Semesta dan Perang Total tersebut menghadapi sejumlah tantangan struktural. Ketimpangan pembangunan infrastruktur pertahanan di wilayah kepulauan, fragmentasi komando dan kendali, serta ketidakseimbangan anggaran merupakan sebagian kendala yang menghambat operasionalisasi sistem pertahanan yang terintegrasi. Reformasi kelembagaan seperti transformasi Kogabwilhan menjadi lima Kompartemen Strategis merupakan langkah penting, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan interoperabilitas antarmatra dan peningkatan kualitas C2 (command and control). Secara empiris, kompleksitas ancaman menunjukkan bahwa struktur komando tradisional tidak lagi memadai untuk merespons ancaman hibrida yang muncul secara bersamaan di banyak domain. Karena itu, peran komando wilayah, kekuatan gabungan, serta kolaborasi sipil-militer harus diperkuat agar pertahanan negara mampu merespons ancaman secara adaptif dan simultan.

Teori Perang Asimetris yang dikembangkan berbagai lembaga termasuk US Army War College (2004) memberikan gambaran bahwa kekuatan militer besar tidak selalu unggul ketika menghadapi lawan yang memanfaatkan taktik tidak konvensional. Bentuk ancaman seperti gerilya modern, operasi psikologis, sabotase digital, dan disinformasi mampu melemahkan negara tanpa mengharuskan kontak fisik langsung. Konteks ini sangat relevan bagi Indonesia, terutama dengan luasnya wilayah, heterogenitas sosial, dan ketergantungan pada sistem teknologi yang semakin meningkat. Oleh karena itu, doktrin pertahanan harus mengintegrasikan kemampuan intelijen strategis, pertahanan siber nasional, literasi digital publik, serta penguatan ketahanan informasi sebagai bagian integral dari struktur pertahanan negara. Selemah apa pun serangan konvensional, perang informasi dan siber dapat menghasilkan dampak strategis yang

lebih luas apabila tidak diantisipasi secara sistemik.

Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk) menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan pertahanan yang berlapis. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana mengelola Komcad ketika penyebaran geografis dan latar belakang sosialnya sangat beragam. Setelah pelatihan selesai, anggota Komcad kembali ke masyarakat dan tersebar di berbagai wilayah sehingga menuntut adanya sistem pemetaan, monitoring, dan mobilisasi berbasis teknologi informasi. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Nasution (1953) tentang pentingnya keterlibatan rakyat terlatih dalam pertahanan negara. Tetapi dalam implementasi modern, keterlibatan itu tidak bisa lagi dikelola melalui mekanisme administratif konvensional, melainkan membutuhkan sistem digital nasional berbasis lokasi yang mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menggerakkan Komcad secara cepat sesuai kebutuhan operasi. Apabila mekanisme ini dapat dibangun, Komcad tidak hanya menjadi cadangan pasif, tetapi menjadi kekuatan rakyat yang siap diaktifkan dalam skema pertahanan berlapis. Bentuk ancaman dan bagaimana semestinya doktrin diterapkan dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 1. Diagram Ekskala Ancaman Kogabwilhan

Berdasarkan gambar di atas, transformasi doktrin pertahanan Indonesia menuntut modernisasi industri pertahanan nasional. Dalam konteks perang berlarut, kemampuan negara mempertahankan operasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah alutsista, tetapi juga oleh kapasitas produksi, pemeliharaan, dan distribusi sumber daya secara mandiri. Oleh karena itu, industri pertahanan nasional perlu diarahkan untuk menghasilkan sistem persenjataan yang efisien, mudah dirawat, dan sesuai dengan kebutuhan operasi di wilayah terpencil. Pengembangan teknologi seperti drone kamikaze, kapal selam mini nirawak, sistem rudal portabel, serta kendaraan taktis bermesin sederhana menjadi kebutuhan strategis yang harus direspon oleh PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perang jangka panjang yang menekankan efektivitas operasional, ketersediaan bahan bakar domestik, dan kemudahan perawatan sebagai faktor utama daya tahan operasi. Selain itu, rencana kontinjensi operasi militer perang (Renkon OMP) perlu diimplementasikan

secara operasional hingga tingkat Babinsa, Babinpotmar, dan Babinpotdirga. Renkon tidak cukup berfungsi sebagai dokumen normatif, tetapi harus diuji melalui latihan berjenjang, gladi pos komando, serta koordinasi lintas komando yang terstruktur.

Pendekatan ini bertujuan memastikan kesiapan Ruang, Alat, dan Kondisi Juang (RAK Juang) sebagaimana diamanatkan dalam doktrin teritorial TNI. Di wilayah kepulauan, penguatan perlawanannya menjadi inti pertahanan dalam skenario perang berlarut, dengan pengembangan adaptasi taktis seperti gerilya modern, operasi drone berbasis komunitas, serta pemanfaatan ruang maritim sebagai bagian dari strategi penghambatan berlapis. Ketahanan sosial-ekonomi masyarakat juga merupakan pilar penting dalam doktrin perang berlarut. Ancaman jangka panjang berpotensi melemahkan negara apabila stabilitas sosial tidak terjaga. Program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berfungsi ganda sebagai instrumen penguatan logistik pangan, karena infrastruktur yang dibangun dapat dikonversi menjadi depo logistik pada situasi kontingen. Pada masa damai, pembentukan klaster produksi pangan berbasis desa memperkuat ketahanan lokal sekaligus menyediakan basis logistik yang siap diaktifkan saat krisis. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan pertahanan nasional dibangun tidak hanya oleh institusi militer, tetapi juga oleh keseluruhan ekosistem sosial-ekonomi negara.

Secara keseluruhan, dinamika tersebut menunjukkan bahwa doktrin pertahanan Indonesia memerlukan transformasi menyeluruh, mulai dari struktur komando hingga kapasitas sosial nasional. Doktrin pertahanan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai kerangka militer, melainkan sebagai landasan strategis yang mengintegrasikan hard power dan soft power, kemampuan militer dan kapasitas sipil, teknologi dan psikologi publik, serta dimensi pusat dan daerah. Dengan perumusan yang komprehensif, doktrin ini diharapkan mampu memperkuat daya tahan nasional dalam menghadapi ancaman jangka panjang serta menjaga kedaulatan dan stabilitas negara di tengah lingkungan strategis yang semakin kompleks dan tidak pasti.

Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Pengembangan Doktrin Perang Berlarut yang Efektif dalam Sistem Pertahanan Negara Indonesia

Pengembangan doktrin perang berlarut dalam konteks pertahanan Indonesia merupakan upaya strategis yang sangat kompleks karena harus menjembatani ketegangan antara prinsip normatif pertahanan negara dan realitas ancaman multidomain yang terus berkembang. Dalam lanskap ancaman kontemporer yang ditandai oleh disrupti teknologi, kompetisi geopolitik, serta meningkatnya serangan asimetris dan hibrida, doktrin lama yang bersifat linear dan konvensional tidak lagi memadai. Oleh karena itu, reformulasi doktrin harus bertumpu pada kerangka teoretis yang kuat yaitu Sistem Pertahanan Semesta (Nasution, 1953), konsep Perang Total (Clausewitz, 1832), dan teori Perang Asimetris (US Army War College, 2004), yang kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan yang aplikatif, terukur, dan responsif terhadap ancaman jangka panjang.

Teori Sistem Pertahanan Semesta memberikan fondasi bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Namun, dalam realitas Indonesia sebagai negara kepulauan, prinsip ini menuntut kemampuan mobilisasi nasional yang tidak hanya menyatukan komponen militer dan sipil, tetapi juga mengatasi tantangan geografis, disparitas infrastruktur, serta variasi kapasitas daerah. Sinergi ini baru efektif apabila disertai mekanisme pemetaan sumber daya yang presisi, penguatan struktur komando kewilayahan, dan pelibatan aktif masyarakat sipil,

pemerintah daerah, serta sektor swasta dalam kerangka kesiapsiagaan berlapis. Dengan demikian, pertahanan tidak hanya bertumpu pada alat utama sistem senjata, tetapi juga pada ketahanan sosial-politik masyarakat yang mampu menyerap tekanan ancaman secara berkepanjangan, yakni suatu prasyarat fundamental dalam perang berlarut.

Modernisasi teknologi menjadi pilar kedua yang menghubungkan prinsip Perang Total dengan kebutuhan operasi multidomain. Clausewitz (1832) mengingatkan bahwa perang adalah mobilisasi total seluruh sumber daya negara, yang dalam konteks modern berarti integrasi kemampuan digital, siber, satelit, dan kecerdasan buatan dalam struktur komando dan kendali. Tanpa C4ISR yang kuat, kemampuan deteksi dini, pengambilan keputusan strategis, dan interoperabilitas matra akan melemah secara signifikan. Ancaman siber dan informasi kini beroperasi pada kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada siklus keputusan militer konvensional; oleh sebab itu, kemampuan otomatisasi, analitik prediktif berbasis AI, dan sistem senjata tanpa awak harus menjadi bagian integral dari doktrin perang berlarut. Ketertinggalan dalam aspek ini akan memberi musuh keunggulan strategis tanpa perlu melakukan serangan fisik konvensional.

Aspek sumber daya manusia pertahanan mengisi pilar ketiga dalam reformulasi doktrin. Ancaman asimetris (terorisme, perang informasi, sabotase digital, infiltrasi ekonomi) menuntut kapasitas SDM yang tidak hanya terlatih secara fisik, tetapi mampu beradaptasi dengan dinamika multidomain. UU PSDN No. 23/2019 mengatur bahwa Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung adalah bagian integral dari sistem pertahanan nasional. Namun, tanpa transformasi pelatihan berbasis teknologi, Komcad tidak akan mampu menghadapi ancaman modern. Pelatihan harus memasukkan disiplin non-konvensional seperti cyber defense, psychological warfare, dan informasi strategis. Platform digital yang memungkinkan Komcad belajar, berlatih, dan berkoordinasi meskipun tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi kebutuhan struktural untuk memastikan kesiapsiagaan yang merata. Ini menegaskan bahwa SDM pertahanan kini harus dilihat sebagai entitas multidimensi yang menggabungkan kemampuan fisik, kognitif, digital, dan sosial.

Selanjutnya, keberhasilan doktrin perang berlarut sangat dipengaruhi oleh tata kelola anggaran pertahanan. Perang jangka panjang menuntut kemampuan negara menjaga kontinuitas sumber daya, bukan hanya melakukan mobilisasi awal. Oleh karena itu, anggaran harus dialokasikan berdasarkan risiko strategis, analisis kerentanan, serta kebutuhan mempertahankan operasi dalam jangka waktu yang panjang. Pendekatan anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah memastikan bahwa setiap alokasi mendukung kesiapsiagaan nyata, termasuk modernisasi alutsista, penguatan logistik, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta peningkatan kapasitas intelijen. Tanpa tata kelola anggaran yang efisien dan akuntabel, doktrin perang berlarut berisiko menjadi formulasi normatif tanpa kekuatan implementatif.

Ringkasnya, doktrin perang berlarut menuntut transformasi mendalam dalam empat dimensi utama: integrasi komponen pertahanan, modernisasi teknologi, penguatan SDM pertahanan, dan pengelolaan anggaran yang berkelanjutan. Tantangan terbesar bukan pada merumuskan doktrin baru, tetapi mengharmonisasikan seluruh elemen negara dalam satu arsitektur pertahanan yang fleksibel, adaptif, dan resilien. Dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik dan spektrum ancaman yang semakin tidak terprediksi, Indonesia tidak dapat lagi bergantung pada doktrin konvensional. Doktrin perang berlarut harus menjadi doktrin strategis yang tidak hanya mempersiapkan negara untuk bertahan, tetapi untuk menahan tekanan berkelanjutan

dalam jangka panjang sambil menjaga stabilitas nasional dan integritas negara.

Strategi Mengintegrasikan Doktrin Perang Berlarut dengan Konsep Pertahanan Negara Indonesia yang Berbasis pada Wilayah Kepulauan dalam Mendukung Pertahanan Negara

Pengembangan strategi integrasi doktrin perang berlarut dalam sistem pertahanan negara Indonesia yang berbasis kepulauan menuntut konstruksi konsep yang jauh melampaui penekanan pada superioritas militer semata. Doktrin ini harus dirancang sebagai bangunan strategis yang holistik, yang secara simultan mengakomodasi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga postur pertahanan tidak hanya kuat di medan tempur, tetapi juga kokoh dalam menopang keberlanjutan kehidupan nasional. Dalam kerangka ini, integrasi antara perspektif Offensive Realism John Mearsheimer dan Teori Keamanan Manusia Mary Kaldor memberikan landasan epistemologis yang saling melengkapi: yang pertama menekankan keharusan negara memaksimalkan kapabilitas militer dalam sistem internasional yang anarkis (Mearsheimer, 2001), sementara yang kedua menggeser fokus keamanan dari negara ke manusia dengan menekankan kesejahteraan, perlindungan sosial, dan keberlanjutan sebagai inti ketahanan (Kaldor, 2007).

Dari perspektif Offensive Realism, Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di titik silang jalur perdagangan maritim dunia tidak dapat bersikap pasif dalam menghadapi kompetisi kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Posisi geografis yang strategis sekaligus rentan ini menuntut strategi proaktif dalam membangun dan mendistribusikan kekuatan militer ke seluruh nodal kepulauan, termasuk pulau-pulau kecil terluar yang menjadi beranda depan kedaulatan. Pendekatan ini mengharuskan pengembangan postur yang didukung pangkalan militer di pulau-pulau strategis, sistem komando dan kendali yang terdesentralisasi namun tetap terkoneksi secara kuat melalui teknologi C4ISR, serta penguatan pertahanan siber untuk menghadapi ancaman di domain digital yang semakin menentukan karakter peperangan modern (Mearsheimer, 2001). Dengan demikian, doktrin perang berlarut tidak hanya mempersiapkan kemampuan defensif untuk bertahan lama, tetapi juga menyediakan kapasitas ofensif yang dapat dikapitalisasi secara selektif di berbagai domain operasi.

Namun, dominasi militer tanpa basis sosial-ekonomi yang kuat berisiko melahirkan postur pertahanan yang rapuh dari dalam. Di sinilah relevansi Teori Keamanan Manusia yang dikembangkan Kaldor menjadi sangat menonjol. Paradigma ini mengkritik pendekatan keamanan tradisional yang menempatkan negara dan militer sebagai pusat gravitasi, dan mengusulkan pergeseran fokus ke perlindungan dan pemberdayaan individu dan komunitas (Kaldor, 2007). Bagi Indonesia yang sangat majemuk dan bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam, keamanan tidak dapat lagi didefinisikan semata sebagai tidak adanya invasi militer, tetapi sebagai terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang stabil, inklusif, dan tangguh terhadap guncangan. Strategi integrasi doktrin perang berlarut karenanya harus memasukkan dimensi ketahanan sosial, stabilitas ekonomi lokal, pengelolaan lingkungan, dan pengurangan kerentanan struktural yang sering menjadi pintu masuk ancaman hibrida dan asimetris.

Integrasi kedua paradigma ini menuntut rekonstruksi strategis yang bersifat multidimensi dan multi-layered. Secara praktis, penguatan kapabilitas militer tidak boleh berjalan terpisah dari agenda pembangunan wilayah dan kesejahteraan komunitas. Pangkalan militer di wilayah kepulauan, misalnya, idealnya tidak hanya berfungsi sebagai titik proyeksi kekuatan, tetapi juga sebagai simpul pembangunan

ekonomi lokal, pusat logistik, dan node pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan ini, keberadaan militer justru memperkuat ekonomi setempat, mengurangi kesenjangan pusat–daerah, dan sekaligus membangun ikatan sosial-politik yang menjadi basis ketahanan non-militer. Pangkalan dan garnisun di pulau besar maupun pulau kecil terdepan dapat dikonseptualisasikan sebagai “anchor points” bagi jaringan pertahanan yang menggabungkan dimensi hard power dan soft power secara simultan.

Pengintegrasian teknologi tinggi dengan pembangunan sosial-ekonomi menuntut pengelolaan sumber daya manusia yang unggul dan adaptif. Personel TNI, Komponen Cadangan, dan aktor pendukung lainnya harus menguasai keterampilan multi-domain: mulai dari operasi tempur konvensional, pemanfaatan C4ISR, hingga perang informasi, perang psikologis, dan pertahanan siber. Ancaman kontemporer yang bersifat tidak linier dan tidak simetris mengharuskan setiap aktor pertahanan memahami bahwa medan konflik tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi meluas ke ruang digital, kognitif, dan naratif. Pelatihan berkelanjutan, penggunaan platform digital untuk simulasi, e-learning, dan manajemen operasi, serta integrasi antara TNI, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi prasyarat terciptanya ekosistem pertahanan yang benar-benar adaptif terhadap perubahan.

Kerangka konseptual dan operasional tersebut memperoleh legitimasi normatif dari landasan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan prinsip Sistem Pertahanan Semesta dan pelibatan seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan pertahanan. Secara substantif, norma ini selaras dengan paradigma Keamanan Manusia yang menempatkan perlindungan dan ketahanan masyarakat sebagai pilar utama stabilitas nasional (UU No. 3/2002). Dalam konteks kepulauan, amanat ini berarti perlunya penguatan basis pertahanan yang terdistribusi, berbasis wilayah, dan didukung oleh pemberdayaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur dasar yang memadai agar setiap wilayah memiliki daya tahan sendiri, namun tetap terkoneksi dalam kerangka pertahanan nasional.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 memperjelas mandat TNI untuk melaksanakan operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Dua dimensi mandat ini sangat relevan dengan doktrin perang berlarut: di satu sisi, TNI harus siap menghadapi ancaman bersenjata konvensional, di sisi lain, TNI juga harus berperan dalam penanggulangan ancaman non-militer seperti terorisme, bencana, konflik sosial, dan ancaman asimetris lain yang kerap berakar pada kerentanan sosial-ekonomi (UU No. 34/2004; UU No. 3/2025). Implementasi kedua mandat ini dalam konteks kepulauan mengharuskan pengembangan kapabilitas logistik yang fleksibel, sistem komando yang terdesentralisasi, serta pemanfaatan teknologi komunikasi yang mampu menjembatani fragmentasi geografis.

Arah modernisasi yang lebih spesifik diformulasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, yang mendorong pembangunan sistem pertahanan berbasis teknologi maju, termasuk sistem C4ISR dan pertahanan siber. Kebijakan ini, jika dikaitkan dengan doktrin perang berlarut, menegaskan pentingnya integrasi antara kemampuan militer konvensional dan kapabilitas pertahanan di domain non-fisik. Sistem C4ISR yang kuat bukan hanya mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas situational awareness, tetapi juga menjadi pengikat bagi struktur komando yang tersebar di wilayah kepulauan (Perpres No. 8/2021). Dalam konteks ancaman hibrida dan perang informasi,

pertahanan siber yang tangguh adalah keharusan strategis, bukan sekadar pelengkap.

Dimensi pertahanan nirmiliter mendapat penekanan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter. Regulasi ini mengukuhkan peran pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sebagai aktor kunci dalam menghadapi ancaman asimetris dan berlarut. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Keamanan Manusia, di mana ketahanan sosial-ekonomi, kualitas tata kelola, dan partisipasi publik menjadi bagian integral dari sistem pertahanan. Di wilayah kepulauan yang kerap ditandai oleh tingkat kerentanan sosial-ekonomi lebih tinggi, pemberdayaan komunitas lokal, penguatan jaringan sosial, dan pembangunan infrastruktur sosial (pendidikan, kesehatan, informasi) menjadi langkah strategis yang berkontribusi langsung pada kapasitas pertahanan nasional (Permenhan No. 57/2014).

Dalam perspektif perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 menegaskan pentingnya perencanaan anggaran pertahanan yang berbasis kinerja dan risiko. Hal ini sangat krusial dalam konteks perang berlarut, karena daya tahan negara dalam konflik jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan mempertahankan suplai sumber daya secara konsisten dan proporsional. Pendekatan risk-based budgeting memungkinkan identifikasi prioritas strategis: penguatan komando terdesentralisasi, modernisasi teknologi, pemberdayaan Komponen Cadangan, serta peningkatan ketahanan sosial-ekonomi wilayah yang paling rentan (Perpres No. 12/2025). Dengan demikian, integrasi doktrin perang berlarut tidak hanya berbicara soal konsep militer, tetapi juga soal tata kelola pembangunan dan keuangan negara. Jika diturunkan ke tingkat implementasi, strategi integrasi ini menuntut optimalisasi integrasi multi-komponen pertahanan yang tersebar di seluruh kepulauan. Prinsip Sistem Pertahanan Semesta sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 mengimplikasikan bahwa Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, BNPT, BSSN, dan berbagai kementerian/lembaga lain harus bekerja dalam satu orkestrasi strategis. Pertukaran intelijen, pengelolaan informasi publik, operasi gabungan, dan penggunaan sumber daya harus diatur dalam mekanisme yang jelas dan teruji. Pemerintah daerah perlu diberdayakan sebagai simpul utama ketahanan lokal, tidak hanya sebagai penerima kebijakan, melainkan sebagai pengelola lini depan pertahanan nirmiliter dan ketahanan sosial-ekonomi di wilayahnya.

Kemandirian pertahanan di wilayah juga menjadi pilar strategis dalam kerangka Offensive Realism. Pembangunan kapabilitas militer yang terdistribusi di lima kepulauan besar dan pulau-pulau terdepan mengharuskan pembaruan struktur komando TNI agar mampu menjalankan operasi multi-domain secara simultan. Modernisasi alutsista (mulai dari sistem pertahanan udara, kapal patroli cepat, kapal selam, pesawat tempur, hingga drone pengawasan) harus dibangun sejalan dengan penguatan kemampuan intelijen berbasis kecerdasan buatan dan data analitik. Dengan konfigurasi ini, doktrin perang berlarut dapat diterjemahkan dalam postur pertahanan yang tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan efek cegah-tangkal yang kredibel bagi aktor eksternal yang berpotensi mengancam (Mearsheimer, 2001).

Di domain siber dan informasi, strategi pertahanan harus mengakui bahwa perang masa kini sangat ditentukan oleh kemampuan mengamankan infrastruktur digital dan mengelola narasi publik. Ancaman siber dan perang informasi dapat menghancurkan kepercayaan publik, melumpuhkan layanan vital, dan melemahkan legitimasi negara tanpa satu pun tembakan dilepaskan. Karena itu, pembangunan pusat komando

pertahanan siber nasional yang melibatkan BSSN, Kementerian Komunikasi dan lembaga digital lainnya menjadi kebutuhan struktural. Pusat ini harus mampu melakukan deteksi dini, respon cepat, dan pemulihan sistemis terhadap serangan siber, sekaligus mengintegrasikan operasi perlindungan infrastruktur kritis, pengelolaan disinformasi, dan penguatan literasi digital masyarakat.

Elemen penting lain dalam strategi integrasi ini adalah pemberdayaan Komponen Cadangan dan pertahanan nirmiliter sebagai penyangga daya tahan nasional. Pengelolaan Komcad yang tersebar di wilayah kepulauan menuntut penggunaan platform digital untuk pemetaan, pelatihan, dan mobilisasi. Pelatihan tidak hanya berisi materi tempur konvensional, tetapi juga pengetahuan keamanan informasi, pertahanan siber dasar, penanganan bencana, dan dukungan logistik. Komcad dan komunitas lokal dapat dijadikan basis perlawanan wilayah yang efektif dalam skenario perang berlarut, sekaligus menjadi agen ketahanan sosial-ekonomi dalam masa damai (UU No. 23/2019).

Keseluruhan kerangka di atas menunjukkan bahwa integrasi doktrin perang berlarut dalam sistem pertahanan negara berbasis kepulauan tidak dapat dipahami sebagai penambahan satu doktrin baru di atas struktur lama, tetapi sebagai rekonstruksi menyeluruh atas cara pandang terhadap pertahanan. Perpaduan antara Offensive Realism yang menuntut penguatan dan proyeksi kekuatan militer maksimal (Mearsheimer, 2001) dan Teori Keamanan Manusia yang mengedepankan keseimbangan sosial-ekonomi sebagai fondasi ketahanan (Kaldor, 2007), jika didukung landasan hukum nasional yang kuat, pembangunan sistem pertahanan yang sekaligus kuat, adaptif, dan berkelanjutan bagi Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Dalam lingkungan strategis global yang volatil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu, hanya pendekatan holistik dan integratif inilah yang mampu menjamin kedaulatan, stabilitas, dan keberlanjutan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman yang ekspansif, destruktif, dan multidomain secara simultan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan dan implementasi doktrin perang berlarut dalam sistem pertahanan negara Indonesia masih berada pada tahap yang belum mapan. Doktrin perang berlarut belum berdiri sebagai doktrin mandiri, sehingga belum memiliki landasan konseptual, operasional, dan kelembagaan yang memadai untuk mengarahkan pembangunan postur pertahanan dan kesiapsiagaan jangka panjang. Kedudukannya yang subordinatif di bawah doktrin Operasi Militer untuk Perang (OMP) menyebabkan doktrin ini belum mampu merespons karakter ancaman kontemporer yang bersifat simultan, berlapis, dan multidimensional.

Hambatan utama teridentifikasi pada tiga ranah strategis, yaitu konseptual, kelembagaan, dan sumber daya. Pada ranah konseptual, belum terdapat arsitektur komando, pola operasi, dan standar kesiapsiagaan yang terintegrasi. Pada ranah kelembagaan, struktur komando yang sentralistik dan belum optimalnya peran komando gabungan membatasi efektivitas respons dalam konteks geografis kepulauan. Sementara itu, pada ranah sumber daya, keterbatasan sistem logistik jangka panjang, optimalisasi komponen cadangan, pertahanan siber, serta ketahanan psikologis memperlemah daya tahan pertahanan dalam konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi doktrin yang komprehensif agar perang berlarut dapat menjadi kerangka strategis yang relevan dan efektif dalam menjaga kedaulatan serta stabilitas nasional.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar perang berlarut direkonstruksi dan diposisikan sebagai doktrin strategis nasional yang berdiri mandiri, dengan hierarki, kewenangan, serta perangkat turunan yang jelas. Rekonstruksi ini perlu mencakup penguatan aspek kinetik dan non-kinetik, termasuk pertahanan siber, operasi informasi, mobilisasi sumber daya nasional, serta pengelolaan stabilitas sosial-ekonomi wilayah secara terintegrasi.

Selanjutnya, diperlukan pembaruan struktur komando yang lebih desentralisasi, penguatan sistem komando dan kendali berbasis teknologi modern, serta digitalisasi perencanaan dan latihan perang berlarut secara nasional. Pengembangan ekosistem ketahanan jangka panjang juga menjadi kebutuhan mendesak melalui integrasi kekuatan militer, kapasitas sipil, teknologi, dan ketahanan masyarakat, termasuk pemberdayaan komponen cadangan dan pendukung berbasis komunitas.

Dengan langkah-langkah tersebut, perang berlarut tidak hanya berfungsi sebagai respons operasional, tetapi menjadi kerangka strategis yang adaptif dan berkelanjutan dalam menjaga kedaulatan, stabilitas nasional, dan daya tahan pertahanan Indonesia menghadapi ancaman multidomain jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Andi Widjadjanto, 2012. Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia
- Amrulloh, M. H., Purwanto, S., Hutajulu, B., & Siagian, F. (2025). Strategi Kodam XVII/Cenderawasih dalam Pemenuhan Personel guna Mendukung Kesiapan Operasi di Papua. *Sparta Multidisciplinary Journal*, 1(1), 16-32.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ancaman Terorisme di Indonesia (2024). <https://www.bnpt.go.id>
- Clark, C. (2023). Understanding Long-Term Warfare: The Case of Russia and Ukraine. Global Security Review. <https://www.globalsecurityreview.com>
- Clausewitz, Carl von. (1832). On War (Vom Kriege). Translated by Michael Howard and Peter Paret. Princeton University Press.
- Creswell, John W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: SAGE Publications
- Dewan Riset Nasional. (2008). Suatu Pemikiran tentang Perang Asimetris (Asymmetric Warfare). Jakarta
- Fadli, M. (2023). Pengembangan Konsep Pertahanan Negara di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Franziska Zeligke, 2023. Kebijakan Pertahanan Untuk Mencapai Sistem Keamanan Nasional, *Jurnal University of Indonesia*
- Hipdizah, S. A., Sigit Purwanto, S. I. P., Yermia Hendarwoto, S. H., Duarte, R. F., Ferdinand Siagian, S. T., & Han, M. (2025). Buku Ajar Doktrin Militer. Yayasan Putra Adi Dharma.
- Karolus Evantino, 2024. Analisis Implementasi Hankamrata di Indonesia ditinjau dari Aspek Anggaran Pertahanan Negara. *Jurnal Prodi Ketahanan Energi, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan RI*
- Kaunang, E. S., Hadianto, M., & Purwanto, S. (2024). THE STRATEGIC, MILITARY AND COUNTERINSURGENCYTACTICS OF THE PERMESTA MOVEMENT (CASE STUDY GUERILLA WARFARE IN SULAWESI). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(6), 4059-4076.
- Lemhannas RI, 2025. Materi Ketahanan Nasional
- Lemhannas RI, 2025. Materi Wawasan Nusantara
- Nasution, A. H. (1953). Pokok-Pokok Gerilya. Jakarta: Penerbit Angkasa.

- M. Asa'ari Yusuf, 2023. Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Indonesia. *Jurnal Universitas Pertahanan RI*
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 1994. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks: SAGE Publications
- Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nadya Widiyanti, 2025. Strategi Pertahanan Indonesia dalam menghadapi Kompleksitas Keamanan Kawasan Asia Pasifik pada tahun 2019-2023. *Jurnal Prodi HI, FISIP Universitas Achmad Yani*
- Pananggungan, B. D., & Purwanto, S. (2025). Pemanfaatan Pilot Drone Sipil Sebagai Bagian Komponen Cadangan Pertahanan Negara. *Centurion MSPD Journal*, 1(1), 346-354.
- Peraturan Presiden RI No. 94 tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan
- Perpres RI No. 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029
- Permenhan RI No. 12 tahun 2023 tentang Doktrin Pertahanan Negara Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter
- Purwanto, S., & Ilhamsyah, I. (2025). Army Human Resources Development Strategy through Human Capital Approach. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(1), 1-22.
- Purwanto, S., Purnomo, M. R., & Budiman, H. (2025). POWER DYNAMICS IN DECISION MAKING: A QUALITATIVE ANALYSIS. *POWER*, 2(1), 80-86.
- Purwanto, S., Basalamah, S., Mallongi, S., & Sukmawati, S. (2020). Effects of Recruitment, Leadership, and Local Culture on Discipline and Performance of Garuda Contingent Soldiers in Lebanon. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5), 606-618.
- Purwanto, S., Hidayatullah, S. S. W., & Tirtoadisuryo, D. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR ENHANCING ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THE DIGITAL ERA.
- Purwanto, S., & Siagian, F. (2025). Strategic human resources management in the global era: Navigating opportunities and challenges. *Centurion MSPD Journal*, 1(1).
- Purwanto, S., & Ismail, D. E. (2024). Manajemen Risiko. Kalimantan Selatan: Ruang Karya.
- Prasetyawan, H. P., AR, D. D., & Purwanto, S. (2025). THE STRATEGY TO IMPROVE THE CHARACTER OF MILITARY ACADEMY CADETS THROUGH THE ROLE OF MENTORS IN SHAPING PROFESSIONAL OFFICERS TO SUPPORT THE MAIN DUTIES OF THE INDONESIAN ARMY:. Sanhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora), 9(6), 2184-2191.
- Ramadhan, R. (2021). Pembaruan Strategi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Non-Konvensional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 15(2)
- Ramadhan, R. (2021). Pentingnya Pembaruan Doktrin Pertahanan di Era Modern. *Jurnal Strategi dan Keamanan*, 14(2),
- Rapim Kemhan dan TNI Tahun 2025 :Peningkatan Kekuatan Pertahanan Negara, diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/2025/01/16/rapim-kemhan-dan-tni-tahun-2025-peningkatan-kekuatan-pertahanan-negara.html> pada 2 April 2025
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tri Yulianto, 2023. Implementasi Doktrin Tridek dalam Strategi Menjaga Kepentingan Nasional Indonesia, *Jurnal Universitas Pertahanan RI*
- UGM, 2024. Mengenal RPJPN 2025-2045, diakses melalui https://psppr.ugm.ac.id/2024/12/17/mengenal-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045/?utm_source=chatgpt.com pada 2 April 2025
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara.